



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Kecamatan Batui Selatan disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Batui Selatan.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Batui Selatan Tahun 2020 didasarkan pada Renstra Kecamatan Batui Selatan 2016-2021 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2020. Tahun 2020 merupakan Tahun ke-4 perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai yang berpedoman pada RPJMD 2016-2021. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batui Selatan serta sejalan dengan visi pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 yakni *“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”*.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

### B. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
14. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2336 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8).

### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud



Rencana Kerja Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai ini disusun dengan maksud untuk menjabarkan seluruh program / kegiatan untuk satu tahun kedepan periode anggaran pada kantor Kecamatan Batui Selatan.

## 2. Tujuan

- a. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional.
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis Jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.
- c. Mengukur Kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

## D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang akan di sajikan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

**BAB II** : Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu menjelaskan kondisi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD, kinerja pelayanan PD, permasalahan pelayanan PD dan kerangka anggaran atas pelaksanaan Program kegiatan yang terealisasi dan tidak terealisasi dari tahun sebelumnya.

**BAB III** : Tujuan dan Sasaran PD, menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

**BAB IV** : Rencana Kerjadan Pendanaan Perangkat Daerah, menjelaskan tentang Rencana Kerja, Program dan kegiatan serta pendanaannya.

**BAB V** : Penutup.